

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
 BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
 TAHUN 2020**

NO.	NO. PERATURAN	TENTANG	KETERANGAN
<b>UNDANG-UNDANG</b>			
1.	UU NO. 23 Tahun 2006	Administrasi Kependudukan	
2.	UU NO. 52 Tahun 2009	Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	
3.	UU NO. 24 Tahun 2013	Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	
<b>PERATURAN PEMERINTAH</b>			
1.	PP NO. 37 Tahun 2007	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	Dicabut Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019
2.	PP NO.102 Tahun 2012	Perubahan Atas PP No.37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan	
3.	PP NO. 40 Tahun 2019	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006	
<b>PERATURAN PRESIDEN</b>			
1.	25 Tahun 2008	Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	Dicabut Dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018
2.	26 Tahun 2009	Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	
3.	35 Tahun 2010	Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009	
4.	67 Tahun 2011	Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009	
5.	126 Tahun 2012	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009	
6.	112 Tahun 2013	Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009	
7.	96 Tahun 2018	Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
<b>PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI</b>			
1.	38 Tahun 2009	Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	
2.	11 Tahun 2010	Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan	Dicabut Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019
3.	12 Tahun 2010	Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain	Dicabut Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

NO.	NO. PERATURAN	TENTANG	KETERANGAN
4.	18 Tahun 2010	Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi	
5.	19 Tahun 2010	Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	Dicabut Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
6.	65 Tahun 2010	Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan	
7.	6 Tahun 2011	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009	
8.	9 Tahun 2011	Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	
9.	10 Tahun 2011	Penerbitan Dokumen Pendaftaran Penduduk Sebagai Akibat Perubahan Alamat	
10.	25 Tahun 2011	Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Dicabut Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019
11.	28 Tahun 2011	Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan	
12.	19 Tahun 2012	Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah	
13.	40 Tahun 2012	Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk Di Daerah	
14.	65 Tahun 2012	Pemberian Penghargaan Dalam Pelaksanaan Pelayanan KTP-el Secara Massal	
15.	68 Tahun 2012	Tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
16.	69 Tahun 2012	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kab/Kota	
17.	34 Tahun 2014	Spesifikasi Teknis Perangkat Pembaca KTP Elektronik	
18.	69 Tahun 2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional	
19.	70 Tahun 2014	Pendelegasian Wewenang Penunjukkan/Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Dana Dekonsentrasi Dan Dana Tugas Pembantuan Bidang Administrasi Kependudukan Tahun 2014	

NO.	NO. PERATURAN	TENTANG	KETERANGAN
20.	14 Tahun 2015	Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen	
21.	57 Tahun 2015	Spesifikasi Blanko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak	
22.	61 Tahun 2015	Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan KTP	Dicabut Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019
23.	74 Tahun 2015	Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik	
24.	76 Tahun 2015	Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada Unit Kerja Yang Menangani Urusan Administrasi Kependudukan di Provinsi dan Kabupaten/Kota	
25.	2 Tahun 2016	Kartu Identitas Anak	
26.	7 Tahun 2016	Pendelegasian Wewenang Penunjukan dan Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran Dana Tugas Pembantuan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
27.	8 Tahun 2016	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional	
28.	9 Tahun 2016	Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	Dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
29.	63 Tahun 2016	Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus	
30.	118 Tahun 2017	Blangko KK, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil	Dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019
31.	119 Tahun 2017	Pengangkatan dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi	
32.	120 Tahun 2017	UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota	
33.	124 Tahun 2017	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	
34.	19 Tahun 2018	Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan	
35.	102 Tahun 2018	Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Spesifikasi Blangko Serta Formulasi Kalimat Dalam Register Akta Pengesahan Anak Dan Kutipan Akta Pengesahan Anak	
36.	5 Tahun 2019	Kebutuhan Persyaratan Dan Tata Cara Penyesuaian/Inpassing Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Administrator Database	

NO.	NO. PERATURAN	TENTANG	KETERANGAN
		Kependudukan	
37.	6 Tahun 2019	Kebutuhan, Persyaratan, Dan Tata Cara Penyesuaian <i>Inpassing</i> Serta Pelaksanaan Tugas Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
38.	7 Tahun 2019	Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring	
39.	53 Tahun 2019	Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	
40.	93 Tahun 2019	Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional ADB Kependudukan	
41.	94 Tahun 2019	Tata Kerja Tim Penilai, Tata Cara Penilaian Angka Kredit dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Operator SIAK	
42.	95 Tahun 2019	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
43.	96 Tahun 2019	Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Admuduk	
44.	99 Tahun 2019	Perubahan Kelima Atas Permendagri No. Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari APBD	
45.	102 Tahun 2019	Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan	
46.	104 Tahun 2019	Pendokumentasian administrasi kependudukan	
47.	108 Tahun 2019	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	
48.	109 Tahun 2019	Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan	
49.	14 Tahun 2020	Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota	
50.	74 Tahun 2020	Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan	
51.	75 Tahun 2020	Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	
52.	76 Tahun 2020	Perangkat Pembaca dan Penulis Serta Perangkat Pembaca Kartu Tanda Penduduk Elektronik	